

KANTOR UPBU KOMODO - LABUAN BAJO



MODUL KEUANGAN

TA. 2023 (SEMESTER II)

KANTOR UPBU KOMODO - LABUAN BAJO



CALK

KATA PENGANTAR

diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Modul Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Modul Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Modul Keuangan.

Penyusunan Modul Keuangan Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 dan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan PeModul Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55 tentang Pedoman Penyusunan Modul Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Modul Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo. Disamping itu, Modul Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Labuan Bajo, 31 Desember 2023

KEPALA KANTOR UPBU KOMODO



CEPEY TRIONO, S.Sos., S.Si.T.

NIP. 19790331 200003 1 001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Surat Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan Atas Modul Keuangan	5
Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	28
VI. Analisa Modul Keuangan	31
VII. Daftar dan Lampiran	43

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca	2
Tabel 3 : Laporan Operasional	3
Tabel 4 : Laporan Perubahan Ekuitas	4
Tabel 5 : Penggolongan Kualitas Piutang	12
Tabel 6 : Masa Manfaat	13
Tabel 7 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP	14
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi PNBP	14
Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	15
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja	15
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Pegawai	16
Tabel 12 : Perbandingan Belanja Barang	16
Tabel 13 : Perbandingan Belanja Modal	17
Tabel 14 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	17
Tabel 15 : Rincian Piutang Bukan Pajak	18
Tabel 16 : Rincian Mutasi Piutang	18
Tabel 17 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	19
Tabel 18 : Rincian Persediaan	19
Tabel 19 : Rincian Mutasi Piutang	19
Tabel 20 : Rincian Aset Tetap	20
Tabel 21 : Rincian Saldo Tanah	20
Tabel 22 : Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	21
Tabel 23 : Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	21
Tabel 24 : Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	22
Tabel 25 : Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	22
Tabel 26 : Konstruksi Dalam Pengerjaan	22
Tabel 27 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
Tabel 28 : Rincian Mutasi Transaksi Terhadap Aset Tak Berwujud	23
Tabel 29 : Rincian Aset Lain-Lain	24
Tabel 30 : Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lain	24
Tabel 31 : Rincian Ekuitas	25



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO**

Jln. Yohanes Sahadun
Labuan Bajo

Telepon (0385) 41132
Facsimile (0385) 41149

komodo.apo@gmail.com
Kode Pos : 8 6 7 5 4

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Modul Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Labuan Bajo, 31 Desember 2023

KEPALA KANTOR UPBU KOMODO

CEPPY TRIONO, S.Sos., S.Si.T.

NIP. 19790331 200003 1 001

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan PeModul Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Modul Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Modul Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Modul Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Modul Keuangan Kantor UPBU Komodo Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Negara pada TA. 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 17.302.563.697,- atau mencapai 124,74 persen dari Estimasi Pendapatan sebesar Rp. 13.920.940.000,-.
- Realisasi Belanja Negara pada TA. 2023 adalah sebesar Rp. 145.972.941.571,- atau mencapai 100,00 persen dari Alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 145.851.487.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2023.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 3.970.525.371.748,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 52.500.000,- Aset Tetap sebesar Rp. 3.970.467.393.095,- Piutang Jangka Panjang Rp. 0,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 5.478.653,-. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.0,-. Sementara itu jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp. 3.970.525.371.748,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 17.297.563.697,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 74.950.900.516,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (57.653.336.819,-). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp. 5.000.000,- dan Pos-Pos Luar Biasa Rp. 0,- sehingga Entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (57.648.336.819,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.899.521.706.691,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (57.648.336.819,-) kemudian ditambah dengan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp. (18.375.998,-) Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 128.670.377.874,- sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 3.970.525.371.748,-

5. CATATAN ATAS MODUL KEUANGAN

Catatan atas Modul Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Modul Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana Strategis

II. KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR UPBU KOMODO

Kantor UPBU Komodo didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan jasa transportasi udara kepada masyarakat luas khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kantor UPBU Komodo bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa transportasi udara yang tertib, teratur, tepat waktu,

bersih dan nyaman selain itu juga memberikan kemudahan serta mendukung wisata di Labuan Bajo.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor UPBU Komodo memerlukan dana untuk menopang kegiatan operasional Bandar Komodo di Labuan Bajo yang pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan keuangan Kantor UPBU Komodo yang Efisien, Akuntanbel dan Transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Kantor UPBU Komodo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Kebijakan
Akuntansi*

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 di Kantor Unit Penyelenggara Kantor UPBU Komodo telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor UPBU Komodo adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan-LRA

*Pendapatan
-LRA*

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan-LO

*Pendapatan
-LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Beban

4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

6) Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

*Piutang
Jangka
Panjang*

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

7) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke

*Aset
Lainnya*

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

8) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana Strategis

II. KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR UPBU KOMODO

Kantor UPBU Komodo didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan jasa transportasi udara kepada masyarakat luas khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kantor UPBU Komodo bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa transportasi udara yang tertib, teratur, tepat waktu,

bersih dan nyaman selain itu juga memberikan kemudahan serta mendukung wisata di Labuan Bajo.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor UPBU Komodo memerlukan dana untuk menopang kegiatan operasional Bandar Komodo di Labuan Bajo yang pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan keuangan Kantor UPBU Komodo yang Efisien, Akuntanbel dan Transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Kantor UPBU Komodo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Kebijakan
Akuntansi*

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 di Kantor Unit Penyelenggara Kantor UPBU Komodo telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor UPBU Komodo adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan-LRA

*Pendapatan
-LRA*

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan-LO

*Pendapatan
-LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Beban

4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Aset

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

6) Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

*Piutang
Jangka
Panjang*

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

7) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke

*Aset
Lainnya*

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

8) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban

9) Ekuitas Dana**Ekuitas
Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

10) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel. 5
Penggolongan Kualitas Piutang

**Penyisihan
Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

11) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap**Penyusutan**

Penyusutan asset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset tetap. Kebijakan penyusutan asset tetap didasarkan pada peraturan Menteri Keuangan No.

01/PMK.06/2013 tentang penyusutan barang milik Negara berupa asset tetap pada entitas pemerintah pusat.

Penyusutan asset tidak dilakukan terhadap :

1. Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
3. Asset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 30 Juni 2012 untuk asset tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2013. Sedangkan untuk asset tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2013, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Perhitungan dan pencatatan penyusutan asset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan asset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari asset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa Manfaat asset tetap ditentukan dengan pedoman pada keputusan menteri keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang table Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa asset tetap pada entitas pemerintah pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut sebagai berikut :

Tabel. 6
Masa Manfaat

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1 Pendapatan Negara dan Hibah**

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
31 Desember 2023
Rp. 17.302.563.697,-
31 Desember 2022
Rp. 13.754.633.808,-

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA. 2023 adalah sebesar Rp. 17.302.563.697,- atau mencapai 124,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 13.920.940.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kantor UPBU Komodo adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 7
Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP

No.	Uraian	Estimasi Pendapatann	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
2.	Pendapatan Jasa	13.920.940.000	17.302.563.697	124
3.	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
4.	Pendapatan Denda Keterlambatan	-	-	-
5.	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
	Jumlah	13.920.940.000	17.302.563.697	124

Realisasi PNBP TA. 2023 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan TA. 2022. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerbangan di Bandar Udara Komodo setelah mengalami masa pengetatan pandemi covid-19 serta meningkatnya sewa-sewa di kawasan bandara.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi PNBP TA. 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-
2.	Pendapatan PNBP Lainnya	17.302.563.697,-	13.754.633.808,-	3.547.929.889,-	20,51
3.	Pendapatan Kekayaan Negara	-	-	-	-
4.	Pendapatan BLU	-	-	-	-
	Jumlah	17.302.563.697,-	13.754.633.808,-	3.547.929.889,-	20,51

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara
31 Desember 2023
Rp. 145.972.941.571,-
31 Desember 2022
Rp. 22.668.492.190,-

Realisasi belanja Kantor UPBU Komodo pada TA. 2023 adalah sebesar Rp. 145.972.941.571,- atau sebesar 100,00 persen dari anggarannya Rp. 145.851.487.000,-. Anggaran dan realisasi belanja TA 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Kode Jenis Blj	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	4.477.770.000	4.640.021.237	103,62
52	Belanja Barang	28.273.403.000	28.237.081.734	99,87
53	Belanja Modal	113.100.314.000	113.095.838.600	100,00
	Jumlah	145.851.487.000	145.972.941.571	100,08

Realisasi belanja TA. 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 123.304.449.381,- dibandingkan periode TA. 2022 dikarenakan kenaikan anggaran di TA. 2023. Perbandingan realisasi belanja TA. 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		31-Dec-23	31-Dec-22	(Rp)	(%)
51	Belanja Pegawai	4,640,021,237	4,070,370,620	569,650,617	14.00
52	Belanja Barang	28,237,081,734	18,598,121,570	9,638,960,164	51.83
53	Belanja Modal	113,095,838,600	-	113,095,838,600	0.00
	Jumlah	145,972,941,571	22,668,492,190	123,304,449,381	132.91

Belanja Pegawai
31 Desember 2023
Rp. 4.640.021.237,-
31 Desember 2022
Rp. 4.070.370.620,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA. 2023 dan TA. 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.640.021.237,- dan Rp. 4.070.370.620,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 569.650.617,-. Kenaikan realisasi belanja pegawai 14 persen antara lain disebabkan bertambahnya adanya kenaikan gaji pokok pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 11
Perbandingan Belanja Pegawai 2023 dan 2022

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik / (Turun)	(%)
Belanja Gaji Pokok PNS	1.580.944.712	1.285.850.000	295.094.712	22,95
Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.564	28.000	5.564	19,87
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	79.822.680	88.000.000	-8.177.320	-9,29
Belanja Tunj. Anak PNS	19.764.942	21.500.000	-1.735.058	-8,07
Belanja Tunj. Struktural PNS	34.790.000	34.300.000	490.000	1,43
Belanja Tunj. Fungsional PNS	16.690.000	12.530.000	4.160.000	33,20
Belanja Tunj. PPh PNS	1.913.300	1.083.000	830.300	76,67
Belanja Tunj. Beras PNS	83.645.100	78.100.000	5.545.100	7,10
Belanja Uang Makan PNS	343.372.000	287.627.000	55.745.000	19,38
Belanja Tunj. Umum PNS	84.065.000	63.405.000	20.660.000	32,58
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja	2.118.911.939	1.904.827.000	214.084.939	100,00
Belanja Uang Lembur	276.068.000	295.207.000	-19.139.000	0,00
Realisasi Belanja Bruto	4.640.021.237	4.072.457.000	567.564.237	13,94
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	4.640.021.237	4.072.457.000	567.564.237	13,94

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang
31 Desember 2023
Rp.
28.237.081.734,-
31 Desember 2022
Rp.
18.598.121.570,-

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 28.237.081.734,- dan Rp. 18.598.121.570,- mengalami kenaikan Rp. 9.638.960.164,-. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 51,83 persen antara lain disebabkan bertambahnya anggaran Belanja Barang Operasional dan Belanja Pemeliharaan lainnya di TA. 2023. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 12
Perbandingan Belanja Barang TA. 2023 dan TA. 2022

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik/(Turun)	(%)
			(Rp)	
Belanja Peralatan	242,766,000	271,995,000	(29,229,000)	-10.75
Belanja Barang dan Jasa	24,394,034,059	14,025,704,071	10,368,329,988	73.92
Belanja Pemeliharaan	3,148,581,675	4,251,537,499	(1,102,955,824)	-25.94
Belanja Perjalanan Dinas	449,000,000	-	449,000,000	0.00
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	28,234,381,734	18,549,236,570	9,685,145,164	52.21
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	28,234,381,734	18,549,236,570	9,685,145,164	52.21

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal
31 Desember 2023
Rp.
113.095.838.600,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-

Realisasi Belanja Modal TA. 2023 dan TA. 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 113.095.838.600,- dan Rp. 0,-.

Rincian Belanja Modal Semester ITA. 2023 dan TA. 2022 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester ITA 2023 dan 2022

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik / (Turun)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-	0.00%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	7,216,310,500	-	7,216,310,500	0.00%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	371,327,500	-	371,327,500	0.00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringa	105,508,200,600	-	105,508,200,600	0.00%
Belanja Modal Fisik lainnya	-	-	-	0.00%
Realisasi Belanja Bruto	113,095,838,600	0	113,095,838,600	0.00%
Pengembalian Belanja	-	-	-	0.00%
Realisasi Belanja Netto	113,095,838,600	0	113,095,838,600	0.00%

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**C.1 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara
Penerimaan
31 Desember 2023
Rp. 0,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca, jumlah tersebut terdiri dari :

Tabel. 14
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Jenis	31-Dec-23	31-Dec-22
1	Bank BNI Labuan bajo	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -

Piutang Bukan
Pajak
31 Desember 2023
Rp. 0,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-

C.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 15
Rincian Piutang Bukan Pajak

No.	Debitur	Jumlah
1	PT. NAM Air	Rp -
2	PT. Wings Air	Rp -
3	PT. Batik Air	Rp -
4	PT. Garuda Indonesia	Rp -
5	PT. Trans Nusa	Rp -
6	PT. Indonesia Air Asia	Rp -
7	PT. Citilink Indonesia	Rp -
	Jumlah	Rp -

Sedangkan mutasi piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 16
Rincian Mutasi Piutang

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-
Mutasi tambah:		
Piutang Sewa	Rp	-
Mutasi kurang:		
Pelunasan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-

C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Berikut disajikan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek untuk masing-masing debitur :

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih - Piutang
Bukan Pajak 31
Desember 2023
Rp. 0,- dan 31
Desember 2022
Rp 0,-

Tabel. 17
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
PT. Nam Air	-	-	0.5%	-
PT. Wings Air	-	-	0.5%	-
PT. Batik Air	-	-	0.5%	-
PT. Garuda	-	-	0.5%	-
PT. Trans Nusa	-	-	0.5%	-
PT. Indonesia Air	-	-	0.5%	-
PT. Citilink	-	-	0.5%	-
Total				Rp -

C.4 Persediaan

Persediaan
31 Desember 2023
Rp. 52.500.000,-
31 Desember 2021
Rp. 49.800.000,-

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 52.500.000,- dan Rp. 49.800.000,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 18
Rincian Persediaan

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
Barang Konsumsi	Rp 52.500.000	Rp 49.500.000
Barang Untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -
Suku Cadang	Rp -	Rp -
Bahan Baku	-	Rp 300.000
Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 52.500.000	Rp 49.800.000

Mutasi persediaan pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 19
Rincian Mutasi Persediaan

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	52.500.000
Mutasi kurang:		
- Habis pakai	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	52.500.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

31 Desember 2023

Rp.

3.970.467.393.095,

-

31 Desember 2022

Rp.

3.899.462.775.602,

-

C.5 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 3.970.467.393.095,- dan Rp. 3.899.462.775.602,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kantor UPBU Komodo Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 20

Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	31-Dec-23	31-Dec-22
1	Tanah	Rp 3.517.708.069.261	Rp 3.517.708.069.261
2	Peralatan dan Mesin	Rp 146.721.471.945	Rp 139.166.403.445
3	Gedung dan Bangunan	Rp 273.441.795.474	Rp 273.070.655.974
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 403.101.331.921	Rp 297.593.131.321
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 846.200.000	Rp 846.200.000
6	KDP	Rp -	Rp -
7	Akumulasi Penyusutan	Rp (371.351.475.506)	Rp (328.921.684.399)
	Jumlah	Rp 3.970.467.393.095	Rp 3.899.462.775.602
7	Aset Tak Berwujud	Rp 14.609.744	Rp 14.609.744
8	Aset Tetap yang tidak digunakan	Rp 459.969.500	Rp 561.806.500
9	Akumulasi Penyusutan	Rp (462.448.155)	Rp (563.632.719)
	Total	Rp 3.970.482.002.839	Rp 3.899.477.385.346

Tanah

31 Desember 2023

Rp.

3.517.708.069.261,

-

31 Desember 2022

Rp.

3.517.708.069.261,

-

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor UPBU Komodo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.517.708.069.261,- dan Rp. 3.517.708.069.261,- ada perubahan nilai aset tanah. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel. 21

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai	Keterangan
1	1	952.000	Rp 3.454.039.208.258	Bersertifikat
2	2	9.325	Rp 63.668.861.003	Bersertifikat
	Total	961.325	Rp 3.517.708.069.261	

Tanah seluas 961.325 m² merupakan tanah lapangan terbang komersial dan terminal bandara untuk operasional Kantor UPBU Komodo.

C.7 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
31 Desember 2023
Rp.
146.721.471.945,-
31 Desember 2022
Rp.
139.170.625.055,-

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 146.721.471.945,- dan Rp. 139.170.625.055,-

Tabel. 22
Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	139,170,625,055
Mutasi tambah:	Rp	11,716,358,500
- Pembelian	Rp	11,716,358,500
- Penyelesaian Pembangunan	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	4,161,290,000
- Reklasifikasi Keluar	Rp	4,161,290,000
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	146,725,693,555

C.8 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
31 Desember 2023
Rp.
273.441.795.474,-
31 Desember 2022
Rp.
273.070.655.974,-

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 273.441.795.474,- dan Rp. 273.070.655.974,-. Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 371.139.500,-.

Tabel. 23
Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	273,070,655,974
Mutasi tambah:	Rp	371,139,500
- Penyelesaian Pembangunan	Rp	-
- Pengembangan Nilai Aset	Rp	371,139,500
- Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	-
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	273,441,795,474

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
31 Desember 2023
Rp.
403.101.331.921,-
31 Desember 2022
Rp.
297.593.131.321,-

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 403.101.331.921,- dan Rp. 297.593.131.321,-.

Tabel. 24

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	297,593,131,321
Mutasi tambah:		<i>111,751,457,000</i>
- Penyelesaian Pembangunan	Rp	111,751,457,000
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp	-
Mutasi kurang:	<i>Rp</i>	<i>6,243,256,400</i>
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp	6,243,256,400
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	403,101,331,921

C.10 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 846,200,000,- dan Rp 846.200.000,- yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

*Aset Tetap**Lainnya**31 Desember 2023**Rp. 846,200,000,-**31 Desember 2021**Rp. 846.200.000,-**Tabel. 25**Mutasi Aset Tetap Lainnya*

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	846,200,000
Mutasi tambah:		
- Penyelesaian Pembangunan	Rp	-
- Transfer Masuk	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Koreksi Pencatatan Nilai	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	846,200,000

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan**31 Desember 2023**Rp. 0,-**31 Desember 2022**Rp. 0,-**Tabel. 26**Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2023*

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	-
Mutasi tambah:	<i>Rp</i>	<i>-</i>
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-
Mutasi kurang:	<i>Rp</i>	<i>-</i>
- Penyeselaian Pembangunan	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31

Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2023
Rp.
(371.351.475.506,-)
31 Desember 2022
(328.921.684.399,-)
)

Desember 2022 adalah masing-masing Rp. (371.351.475.506,-) dan Rp. (328.921.684.399,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 27
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 146.721.471.945	Rp (119.617.036.505)	Rp 27.104.435.440
2	Gedung dan Bangunan	Rp 273.441.795.474	Rp (35.609.806.519)	Rp 237.831.988.955
3	Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan	Rp 403.101.331.921	Rp (216.124.632.482)	Rp 186.976.699.439
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 846.200.000	Rp -	Rp 846.200.000
Akumulasi Penyusutan		Rp 824.110.799.340	Rp (371.351.475.506)	Rp 452.759.323.834

C.13 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 14.609.744,- dan Rp. 14.609.744,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tak Berwujud
31 Desember 2023
Rp.14.609.744,-
31 Desember 2022
Rp. 14.609.744,-

Tabel. 28
Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	14,609,744
Mutasi tambah:	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	14,609,744

C.14 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.

Aset Lain-Lain
31 Desember 2023
Rp. 456.969.500,-
31 Desember 2022
Rp. 456.969.500,-

456.969.500,- dan Rp. 456.969.500,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Tabel. 29

Aset Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2023

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	456,969,500
Mutasi tambah:		
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap	Rp	-
Mutasi kurang:	-	
- Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan	Rp	-
- Penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	456,969,500

C. 15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp. (466.100.591,-) dan Rp. (462.448.155,-) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 30

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi TA 2023

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	Rp 14.609.744	Rp -	Rp 14.609.744
Aset Lain-lain	Rp 456.969.500	Rp (466.100.591)	Rp (9.131.091)
Jumlah			Rp 5.478.653

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
31 Desember 2023
Rp. (466.100.591,-)
31 Desember 2022
Rp. (462.448.155,-)

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.970.525.371.748,- dan Rp. 3.899.521.706.691,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas :

Tabel. 30

Ekuitas Tahun Anggaran 2023

Ekuitas
31 Desember 2023
Rp.
3.970.525.371.748,
- dan 31 Desember
2022 Rp.
3.899.521.706.691,
-

Saldo Per 31 Desember 2022	Rp. 3.899.521.706.691
Mutasi Tambah :	Rp. 71.003.665.057
Mutasi Kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp. 3.970.525.371.748

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
31 Desember 2023
Rp.
17.297.563.697,-
31 Desember 2022
Rp.
12.999.672.764,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 17.297.563.697,- dan Rp. 12.999.672.764,- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
31 Desember 2023
Rp.4.640.021.237,-
31 Desember 2022
Rp. 4.070.370.620,-

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.640.021.237,- dan Rp. 4.070.370.620,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
31 Desember 2023
Rp. 242.766.000,-
31 Desember 2022
Rp. 271.995.000*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 242.766.000,- dan Rp. 271.995.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa 31 Desember
2023
Rp.
24.394.034.059,-
31 Desember 2022
Rp.
14.025.704.071,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.025.704.071,- dan Rp. 14.025.704.071,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
31 Desember 2023
Rp.
3.148.581.675,-
31 Desember 2022
Rp.
4.251.537.499,-*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.148.581.675 ,- dan Rp. 4.251.537.499,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
31 Desember 2023
Rp. 449.000.000,-
31 Desember 2021
Rp. 0,-*

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 449.000.000,- dan Rp. 0,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
31 Desember 2023
Rp. 0,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial
31 Desember 2023
Rp. 0,-*

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan

31 Desember 2021 beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk
Rp. 0,2 menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan 31
31 Desember 2023 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 42.076.497.545,- dan Rp.
Rp. 45.514.987.019,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat
42.076.497.545,- alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable*
31 Desember 2022 *assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban
Rp. 45.514.987.019,- Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk
Aset Tak berwujud.

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat
Tertagih estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan
31 Desember 2023 Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah
Rp. 0,- masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp. 0,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan
Rp. 0,- beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak
31 Desember 2022 menghasilkan aset tetap.
Rp. 0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus /Defisit Jumlah Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 2023 dan 31
dari Kegiatan Non Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pos
Operasional 31 Desember 2023 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban
Rp. 0,- yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.
31 Desember 2022
Rp. 0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering
31 Desember 2023 terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas masing-masing
Rp. 0,- sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.
31 Desember 2022
Rp. 0,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
31 Desember 2023
Rp.
3.899.521.706.691,
-
31 Desember 2022
Rp.
3.849.772.542.891,
-

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.899.521.706.691,- dan Rp. 3.849.772.542.891,-

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Defisit LO
31 Desember 2023
Rp.
(57.648.336.819,-)
31 Desember 2022
Rp.
(54.379.960.401,-).

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (57.648.336.819,-) dan Rp. (54.379.960.401,-). Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
31 Desember 2023
Rp. 0,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap
31 Desember 2023
Rp. 0,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban
31 Desember 2023
Rp. 0,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas
Pendapatan
31 Desember 2023
Rp. 0,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

E.7 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap 31
Desember 2023
Rp. 0,-
31 Desember 2022
Rp. 0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Selisih Revaluasi Aset Tetap pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
31 Desember 2023
Rp.
3.970.525.371.748,
-
31 Desember 2022
Rp.
3.899.521.706.691,
-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.970.525.371.748- dan Rp. 3.899.521.706.691,-.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU KOMODO 414251

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 2:19 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	13,920,940,000	17,302,563,697	3,381,623,697	124	7,062,724,000	13,754,633,808	6,691,909,808	195
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,920,940,000	17,302,563,697	3,381,623,697	124	7,062,724,000	13,754,633,808	6,691,909,808	195
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	13,920,940,000	17,302,563,697	3,381,623,697	124	7,062,724,000	13,754,633,808	6,691,909,808	195
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	145,851,487,000	145,972,941,571	121,454,571	100	22,692,165,000	22,668,492,190	(23,672,810)	100
1. Belanja Pegawai	4,477,770,000	4,640,021,237	162,251,237	104	4,072,457,000	4,070,370,620	(2,086,380)	100
2. Belanja Barang	28,273,403,000	28,237,081,734	(36,321,266)	100	18,619,708,000	18,598,121,570	(21,586,430)	100
3. Belanja Modal	113,100,314,000	113,095,838,600	(4,475,400)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU KOMODO 414251

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 2:19 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	145,851,487,000	145,972,941,571	121,454,571	100	22,692,165,000	22,668,492,190	(23,672,810)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Labuan Bajo, 29 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Kantor



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (414251) KANTOR UPBU KOMODO

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/01/24 2:17 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	17,297,563,697	12,999,672,764	4,297,890,933	33.062
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	17,297,563,697	12,999,672,764	4,297,890,933	33.062
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	17,297,563,697	12,999,672,764	4,297,890,933	33.062
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	4,640,021,237	4,070,370,620	569,650,617	13.995
Beban Persediaan	242,766,000	271,995,000	(29,229,000)	(10.746)
Beban Barang dan Jasa	24,394,034,059	14,025,704,071	10,368,329,988	73.924
Beban Pemeliharaan	3,148,581,675	4,251,537,499	(1,102,955,824)	(25.943)
Beban Perjalanan Dinas	449,000,000	0	449,000,000	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (414251) KANTOR UPBU KOMODO

Tgl Data : 29/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 29/01/24 2:17 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	42,076,497,545	45,514,987,019	(3,438,489,474)	(7.555)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	74,950,900,516	68,134,594,209	6,816,306,307	10.004
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(57,653,336,819)	(55,134,921,445)	(2,518,415,374)	4.568
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	664,960,908	(664,960,908)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	664,960,908	(664,960,908)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,000,000	90,000,136	(85,000,136)	(94.444)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,000,000	90,000,136	(85,000,136)	(94.444)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5,000,000	754,961,044	(749,961,044)	(99.338)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(57,648,336,819)	(54,379,960,401)	(3,268,376,418)	6.01
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(57,648,336,819)	(54,379,960,401)	(3,268,376,418)	6.01

Keterangan :

FINAL

Labuan Bajo, 29 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Kantor



CEPPY TRIONO, S.Sos., S.SiT.

197903312000031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (414251) KANTOR UPBU KOMODO

Tgl Data : 29/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 29/01/24 2:18 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,899,521,706,691	3,849,772,542,891	49,749,163,800	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(57,648,336,819)	(54,379,960,401)	(3,268,376,418)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(18,375,998)	(29,635,875,853)	29,617,499,855	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(18,375,998)	(29,635,875,853)	29,617,499,855	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	128,670,377,874	133,765,000,054	(5,094,622,180)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	71,003,665,057	49,749,163,800	21,254,501,257	-
EKUITAS AKHIR	3,970,525,371,748	3,899,521,706,691	71,003,665,057	-

Keterangan :

FINAL

Labuan Bajo, 29 Januari 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kepala Kantor

CEPPY TRIONO S.Sos., S.SiT.
 197903312000031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
 SATUAN KERJA : (414251) KANTOR UPBU KOMODO

Tgl Data : 29/01/24 12:00 PM
 Tgl Cetak : 29/01/24 2:19 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	52,500,000	49,800,000	2,700,000	5.42
JUMLAH ASET LANCAR	52,500,000	49,800,000	2,700,000	5.42
ASET TETAP				
Tanah	3,517,708,069,261	3,517,708,069,261	0	0.00
Peralatan dan Mesin	146,721,471,945	139,166,403,445	7,555,068,500	5.43
Gedung dan Bangunan	273,441,795,474	273,070,655,974	371,139,500	0.14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	403,101,331,921	297,593,131,321	105,508,200,600	35.45
Aset Tetap Lainnya	846,200,000	846,200,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(371,351,475,506)	(328,921,684,399)	(42,429,791,107)	12.90
JUMLAH ASET TETAP	3,970,467,393,095	3,899,462,775,602	71,004,617,493	1.82
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	14,609,744	14,609,744	0	0.00
Aset Lain-lain	456,969,500	456,969,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(466,100,591)	(462,448,155)	(3,652,436)	0.79
JUMLAH ASET LAINNYA	5,478,653	9,131,089	(3,652,436)	(40.00)
JUMLAH ASET	3,970,525,371,748	3,899,521,706,691	71,003,665,057	1.82

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,970,525,371,748	3,899,521,706,691	71,003,665,057	1.82
JUMLAH EKUITAS	3,970,525,371,748	3,899,521,706,691	71,003,665,057	1.82
JUMLAH EKUITAS	3,970,525,371,748	3,899,521,706,691	71,003,665,057	1.82
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,970,525,371,748	3,899,521,706,691	71,003,665,057	1.82

Keterangan :

FINAL

Labuan Bajo, 29 Januari 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kepala Kantor

 CEPPEY TRIONO, S.Sos., S.Si.
 197903312000031001

